



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 11 FEBRUARI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Terdampak Flyover, Pemkab Relokasi Kantor Desa dan Mapolsek Gedangan

Pembebasan 157 Lahan Dimulai Bulan Ini



SEMARAWU: Banyaknya pelanggar lalu lintas menjadi salah satu penyebab kemacetan di perempatan Gedangan.



- Rencana dimulai bulan ini
- Anggaran awal Rp 264,8 miliar
- Ada 157 bidang lahan yang terdampak
- Pembebasan lahan dipusatkan di sisi timur

maksimal delapan bulan," tambah Makhmud.

Disiapkan Rp 264,8 Miliar Asisten II Setda Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig mengatakan luas bangunan yang terdampak tercatat 8.975 meter persegi dengan jumlah warga sekitar 160 jiwa.

"Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Februari ini akan dimulai. Pembebasan lahan rampung

hitungkan kebutuhan total lahan. Terdapat 157 bidang tanah yang masuk rencana pembebasan. Adapun lahan yang diperlukan 14.406 meter persegi atau sekitar 1,44 hektare. Diantara sejumlah bangunan yang terdampak yakni Mapolsek Gedangan dan Kantor

Selesai Delapan Bulan Saat ini, Pemkab sudah meng-



Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Februari ini akan dimulai. Pembebasan lahan rampung maksimal delapan bulan."

M. Makhmud Kepala DPBMSDA Sidoarjo



Dari keseluruhan bidang, estimasi anggaran mencapai Rp 264,8 miliar."

Bahrul Amig Asisten II Setda Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo cara final setelah penilaian appraisal independen. Penilaian dilakukan untuk memastikan nilai ganti rugi sesuai ketentuan. (eza/fal/hen)



Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nashih didampingi wakil ketua dewan, di ruang Paripurna dewan, menerima aspirasi massa, yang ingin agar Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo segera mulai kampanye di rumah.

DPRD Sidoarjo Akan Pertemuan Bupati dengan Wakil Bupati

Sidoarjo, Bhirawa

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdullah Nashih, mengatakan pihak dewan akan segera mengadakan pertemuan antara Bupati Sidoarjo Subandi dengan Wakil Bupati Mimik Idayana.

Nashih mengatakan pihaknya akan mendampingi aspirasi kelompok masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tersebut secepatnya melakukan inspeksi berkampanye di seluruh wilayah.

Sejumlah ormas dan LSM di Kabupaten Sidoarjo, seperti GRIB JAWA, YALPK, GMBI, KORAK, GMPI, MADAS, URC, Golek, LMPP, PBB, Pemuda Pancasila, hingga ALAS, Selasa pagi (10/2) kemarin, unjuk rasa ke Kantor DPRD Sidoarjo, menyuarakan aspirasi terkait situasi politik internal di Pemkab Sidoarjo, yang dinilai semakin memanas, akibat disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati.

Ormas dan LSM ditemui oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nashih, didampingi sejumlah pimpinan dewan seperti H. Kayan, H. Warih Andono, dan Suryanto, serta Anggota DPRD Yudi Pratama, di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Massa menyampaikan keresahan, karena apabila terus terjadi disharmoni, kondisi pemerintahan daerah bisa tidak kondusif dan berpotensi menghambat pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut massa, warga masyarakat Sidoarjo menjadi pihak yang paling dirugikan apabila konflik kepemimpinan ini terus berlanjut. Massa mendesak DPRD Sidoarjo, agar tidak bersikap pasif dan segera menjalankan fungsi pengawasan sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai bagian dari checks and balances. Tuntutan utama massa, meliputi penangguhan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum terbuka, fasilitasi rekonsiliasi politik, hingga mendorong hak interupsi atau angket bila konflik terus berlanjut. Massa mengesakan mereka mengemukakan rakyat Sidoarjo, bukan oknum atau kelompok tertentu. Ini murni gerakan bersama demi kebaikan daerah. Aliansi juga menyiapkan langkah lanjutan jika mediasi tidak segera terlaksana. Mereka menuntut segera pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14/2019.

Polresta Sidoarjo Hadirkan Layanan Publik di CFD Alun-Alun Kota

Sidoarjo, Memorandum

Polresta Sidoarjo menghadirkan berbagai layanan publik saat car free day (CFD) di Alun-Alun Sidoarjo guna memberi rasa aman dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran personel kepolisian tersebut tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga melayani warga secara humanis yang memanfaatkan akhir pekan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo.

Pelayanan kepolisian yang disediakan meliputi SKCK Keliling Online, SIM Keliling, Samsat Keliling, serta pemeriksaan kesehatan berupa cek gula darah, kolesterol, dan tekanan darah.



Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rokif menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud kedekatan Polri dengan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Antusias masyarakat yang datang ke car free day cukup tinggi, karenanya kami hadir untuk memberikan rasa aman dan pelayanan Polri bagi masyarakat," ujar AKBP M Zainur Rokif, Minggu (8/2).

Ia menambahkan, kegiatan serupa akan rutin digelar agar masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kepolisian.

Selain itu, layanan publik



Personel Polresta Sidoarjo membuka layanan publik saat car free day di Alun-Alun Sidoarjo.

tersebut mendapat sambutan positif dari warga. M Syarif, warga Jasem, mengaku terbantu karena dapat mengurus SKCK sekaligus memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

"Tadi saya mau mengurus SKCK dan ternyata ada pelayanannya disini. Saya juga mengajak ibu untuk periksa kesehatan gratis, ini sangat membantu," ungkap M Syarif. (san/fer)



Polsek Balongbendo panen raya jagung, kemarin.

Polsek Balongbendo Panen Raya Jagung

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Polsek Balongbendo Polresta Sidoarjo Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026. Itu sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (10/2/2026) di lahan pertanian Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

Panen raya ini dipimpin Kapolsek Balongbendo Kopol Sugeng Sulistiyono, serta dihadiri jajaran PJU Polsek Balongbendo, perwakilan SDM Polresta Sidoarjo, anggota Polsek Balongbendo, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Balongbendo, dan Gapoktan Desa Singkalan.

Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin Kapolsek Balongbendo. Dalam amanatnya, Kopol Sugeng Sulistiyono menyampaikan bahwa panen raya jagung ini merupakan wujud implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam bidang ketahanan pangan.

"Panen raya jagung ini adalah langkah positif untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya jagung, di wilayah Kecamatan Balongbendo. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung program penanaman ini," ujarnya. (cat/rus)

Hasil Pengerukan Dimanfaatkan untuk Pembangunan Koperasi

Kebut Normalisasi Sungai

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak ingin kecolongan saat musim penghujan tiba. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), perang terhadap sedimen dan sumbatan sungai terus digencarkan. Alat-alat berat dikerahkan ke titik-titik strategis guna memastikan aliran air tetap lancar dan risiko banjir dapat ditekan seminimal mungkin. Fokus utama saat ini tertuju pada aliran sungai di belakang Pakrik Gula (PG) Krembung, tepatnya di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung. Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Muhammad Makhmud



DIKERUK: Sejumlah alat berat diterjunkin untuk normalisasi sungai di Sidoarjo dengan tujuan mencegah banjir.

menegaskan, pengerjaan di titik ini bersifat krusial karena tumpukan sedimen yang sudah melebihi kapasitas sungai.

"Kita melakukan normalisasi sungai di belakang PG Krembung karena sedimennya sudah sangat banyak. Oleh karena itu, perlu ada intervensi cepat," ujar Makhmud, Selasa (10/2).

Pengerjaan di Mojoruntut mencakup aliran sepanjang tiga kilometer. Makhmud mengatakan timnya bekerja dengan efisiensi tinggi agar alat berat dapat segera bergeser ke zona merah lainnya.

"Target kami dua sampai tiga hari lagi sudah selesai di sini. Setelah itu, kami akan berpindah ke lokasi yang lain secara simultan," tambahnya.

Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih didampingi wakil ketua dewan, di ruang Paripurna dewan, menerima aspirasi massa, yang ingin agar Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo segera islah karena disharmoni. alikus/bhirawa

DPRD Sidoarjo Akan Pertemuan Bupati dengan Wakil Bupati

Sidoarjo, Bhirawa

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih, mengatakan pihak dewan akan segera mengagendakan pertemuan antara Bupati Sidoarjo Subandi dengan Wakil Bupati Mimik Idayana.

Nasih mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi kelompok masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang minta agar Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tersebut secepatnya melakukan islah.

"DPRD berkomitmen akan segera mengundang Bupati dan wakil bupati untuk klarifikasi sekaligus mediasi," kata Nasih, dalam pertemuan dengan sejumlah aliansi massa di Kabupaten Sidoarjo.

Sejumlah ormas dan LSM di Kabupaten Sidoarjo, seperti GRIB JAYA, YALPK, GMBI, KORAK, GMPI, MADAS, URC Gojek, LMPP, PBB, Pemuda Pancasila, hingga ALAS, Selasa pagi (10/2) kemarin, unjuk rasa ke Kantor DPRD Sidoarjo, menyuarakan aspirasi terkait situasi politik internal di Pemkab Sidoarjo, yang dinilai semakin memanas, akibat disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati.

Ormas dan LSM ditemui oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, didampingi sejumlah pimpinan dewan seperti H. Kayan, H. Warih Andono, dan Suryanto, serta Anggota DPRD Yudi Pratama, di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo.

Massa menyampaikan keresahan, karena apabila terus terjadi disharmoni, kondisi pemerintahan daerah bisa tidak kondusif dan berpotensi menghambat pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut massa, warga masyarakat Sidoarjo menjadi pihak yang paling dirugikan apabila konflik kepemimpinan ini terus berlarut-larut.

Massa mendesak DPRD Sidoarjo, agar tidak bersikap pasif dan segera

menjalankan fungsi pengawasan sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai bagian dari checks and balances.

Tuntutan utama massa, meliputi pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum terbuka, fasilitasi rekonsiliasi politik, hingga mendorong hak interpelasi atau angket bila konflik terus berlanjut.

Massa menegaskan mereka mengatasnamakan rakyat Sidoarjo, bukan oknum atau kelompok tertentu. Ini murni gerakan bersama demi kebaikan daerah.

Aliansi juga menyiapkan langkah lanjutan jika mediasi tidak segera terlaksana. Mereka memberi tenggat waktu sebelum Ramadan 1447 H.n [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa
Media Rakyat Sidoarjo

Jelang Ramadan, Bupati Tekankan Ketertiban dan Toleransi

SIDOARJO - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga stabilitas daerah, tertib umum, serta memperkuat sikap saling menghormati antarwarga.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Subandi saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Senin sore (9/2/26).

Subandi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama Ramadan. Ia mengingatkan agar perbedaan dalam praktik ibadah, seperti jumlah rakaat salat tarawih, tidak dijadikan polemik. Menurutnya, yang terpenting adalah saling menghormati dan men-



LOETFI/DUTA

Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah di Fave Hotel Sidoarjo, Senin (9/2/26)

jaga kerukunan di lingkungan masing-masing.

Selain itu, Subandi meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Satpol PP, untuk meningkatkan pengawasan ketertiban umum selama Ramadan. Pengawasan tersebut mencakup aktivitas pedagang kaki lima (PKL), terutama terkait penjualan makanan pada siang hari.

"PKL tetap perlu ditoleransi, namun harus ada sosialisasi agar aktivitas usaha tidak mengganggu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa," ujarnya Senin sore (9/2/26).

Di sektor pendidikan, Subandi meminta Dinas Pendidikan agar lebih tegas mengawasi kegiatan sekolah, termasuk praktik outing class yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ia menekankan bahwa kegiatan luar sekolah sebaiknya dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo atau sekitarnya.

Subandi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan sekolah agar

kepala sekolah dapat memberikan contoh yang baik.

Masih lanjut Subandi dirinya turut menyoroti kebiasaan masyarakat berupa kegiatan pengajian malam hari yang kerap berlangsung hingga larut malam. Ia menilai perlu adanya kesepakatan bersama terkait batas waktu kegiatan agar tidak mengganggu waktu istirahat warga.

Menurutnya, pengajian yang biasanya berlangsung hingga pukul 24.00 perlu diatur dengan baik dan disepakati bersama. Ketentuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) sebagai pedoman penyesuaian kegiatan masyarakat selama Ramadan.

Selain itu, Subandi juga menyinggung tradisi takbiran menjelang Idulfitri yang selama ini dilakukan dengan cara berkeliling. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan takbiran keliling masih akan dibahas kembali. Apabila tidak diperbolehkan, masyarakat diimbau untuk melaksanakan takbiran di lingkungan masing-masing atau di masjid.

Meski demikian, Subandi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin menghilangkan tradisi dan kearifan lokal yang telah mengakar di masyarakat. Tradisi takbiran anak-anak dan kegiatan keagamaan lainnya tetap dapat dilaksanakan dengan pengaturan yang baik agar suasana Lebaran tetap semarak, aman, dan tertib. ● Loe

N PERTANAHAN NASIONAL

Penentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan
Ipiat yang dinyatakan hilang sebagai berikut :

PENGUMUMAN
(Tentang Sertifikat Hilang)
Nomor : HP.03.02/189-35.21/II/2026

		Keterangan
Nama Pemilik Sertifikat	Tanggal Pembelian	Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah
SUMINAH	25 September 2017	- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/214/2026/SPKT/PPOLRES NGAWIPOLDA JAWA TIMUR Tanggal : 14 Januari 2026 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal : 06 Februari 2026
PIPIIT PURWANTI	03 Juli 1998	- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/244/2026/SPKT/PPOLRES NGAWIPOLDA JAWA TIMUR Tanggal : 22 Januari 2026 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal : 06 Februari 2026
JAYUSUDARSI	24 Maret 1997	- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/283/2026/SPKT/PPOLRES NGAWIPOLDA JAWA TIMUR Tanggal : 27 Januari 2026 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal : 06 Februari 2026
SUNARTO	10 Juni 2019	- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/218/2026/SPKT/PPOLRES NGAWIPOLDA JAWA TIMUR Tanggal : 21 Januari 2026 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal : 06 Februari 2026
SUPARNO	02 Maret 2021	- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/97/2026/SPKT/PPOLRES NGAWIPOLDA JAWA TIMUR Tanggal : 09 Januari 2026 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal : 06 Februari 2026
023 IMAM ABIDIN	21 Agustus 2023	- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/272/2026/SPKT/PPOLRES NGAWIPOLDA JAWA TIMUR Tanggal : 28 Januari 2026 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal : 06 Februari 2026
IMAM ABIDIN	28 Agustus 2023	- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/272/2026/SPKT/PPOLRES NGAWIPOLDA JAWA TIMUR Tanggal : 28 Januari 2026 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal : 06 Februari 2026
WANTO	21 Desember 2021	Rundel Hilang : 11

DUTA



Polsek Balongbendo panen raya jagung, kemarin.

Polsek Balongbendo Panen Raya Jagung

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Polsek Balongbendo Polresta Sidoarjo Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026. Itu sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (10/2/2026) di lahan pertanian Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

Panen raya ini dipimpin Kapolsek Balongbendo Kompol Sugeng Sulistiyono, serta dihadiri jajaran PJU Polsek Balongbendo, perwakilan SDM Polresta Sidoarjo, anggota Polsek Balongbendo, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Balongbendo, dan Gapoktan Desa Singkalan.

Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin Kapolsek Balongbendo. Dalam amanatnya, Kompol Sugeng Sulistiyono menyampaikan bahwa panen raya jagung ini merupakan wujud implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam bidang ketahanan pangan.

“Panen raya jagung ini adalah langkah positif untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya jagung, di wilayah Kecamatan Balongbendo. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung program penanaman ini,” ujarnya. (cat/rus)

Terdampak Flyover, Pemkab Relokasi Kantor Desa dan Mapolsek Gedangan

Pembebasan
157 Lahan
Dimulai Bulan Ini

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo bakal memulai proses pembebasan lahan untuk flyover (FO) Gedangan. Rencananya, tahapan itu dimulai bulan ini setelah keputusan desain final proyek peningkatan jalan nasional dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa-Bali terbit.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPBMSDA) Sidoarjo M. Makhmud menjelaskan, pembangunan FO memerlukan pelebaran jalan nasional. Opsi terbaru, pembebasan lahan diarahkan ke sisi timur karena lebih mudah.

"Di sisi barat ada masjid dan sekolah yang potensi penolakannya besar," kata Makhmud. Setelah desain disahkan, Pemkab akan membentuk panitia dan tim percepatan yang terdiri atas tim advokasi, sosialisasi, serta tim pembebasan lahan agar proses berjalan serentak dan lebih cepat.

Selesai Delapan Bulan
Saat ini, Pemkab sudah meng-



SEMRAWUT: Banyaknya pelanggar lalu lintas menjadi salah satu penyebab kemacetan di perempatan Gedangan.



- Rencana dimulai bulan ini
- Anggaran awal Rp 264,8 miliar
- Ada 157 bidang lahan yang terdampak
- Pembebasan lahan dipusatkan di sisi timur

Sumber: DPBMSDA Sidoarjo

GRAFIS: ADITI/JAWA POS

hitung kebutuhan total lahan. Terdapat 157 bidang tanah yang masuk rencana pembebasan. Adapun luas tanah yang diperlukan 14.406 meter persegi atau sekitar 1,44 hektare.

Diantara sejumlah bangunan yang terdampak yakni Mapolsek Gedangan dan Kantor

Desa Gedangan. Kedua bangunan itu akan direlokasi. Namun, Pemkab belum menentukan lokasi baru untuk kedua tempat layanan tersebut.

"Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Februari ini akan dimulai. Pembebasan lahan rampung

maksimal delapan bulan," tambah Makhmud.

Disiapkan Rp 264,8 Miliar

Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig mengatakan luas bangunan yang terdampak tercatat 8.975 meter persegi dengan jumlah warga sekitar 160 jiwa.

"Dari keseluruhan bidang, estimasi anggaran mencapai Rp 264,8 miliar," jelas Amig. Dia menegaskan jika nilai tersebut masih bersifat estimasi awal dan akan ditetapkan se-



Dokumen tuntutan dari Aliansi Peduli Sidoarjo yang diberikan unsur pimpinan dewan.

Pimpinan DPRD Teken Dukungan Moral

USAI menyampaikan aspirasi, perwakilan massa pukul 10.30 WIB, diterima di ruang paripurna untuk beraudiensi dengan jajaran legislatif. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih, bersama para wakil ketua yang terdiri dari H Kayan, H Warih, dan Suryanto, serta anggota dewan Yudi Pratama.

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan tiga poin krusial dampak keretakan pimpinan, Terjadinya kubu-kubuan di kalangan ASN dan perangkat desa, Ketidakpastian kebijakan yang membuat investor ragu masuk ke Sidoarjo, Melemahnya pengawasan internal yang membuka celah bagi praktik pungli dan korupsi.

Hasil audiensi, pimpinan DPRD menyatakan sikap searah dengan kegelisahan

masyarakat. Sebagai bentuk komitmen nyata, ketua dan para wakil ketua DPRD Sidoarjo menandatangani berita acara serta dokumen tuntutan dari Laskar Jenggolo. "Kami berdiri bersama rakyat. Penandatanganan ini adalah bentuk dukungan moral kami terhadap aspirasi Laskar Jenggolo," tegas Abdillah Nasih.

Meski audiensi berakhir kondusif, Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo Bramada Pratama Putra menegaskan, aksi ini adalah peringatan terakhir bagi eksekutif. "Jika mediasi ini menemui jalan buntu, kami tidak akan tinggal diam. Kami siap memobilisasi massa yang lebih besar untuk membawa carut-marut Sidoarjo ini ke Kemendagri, bahkan hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto," tegasnya. (sbs/san/epe)



Alat berat melakukan pengerukan sampah dan sedimentasi di sungai.

DPUBMSA Genjot Normalisasi Kali



Sidoarjo, Memorandum

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSA) terus memacu proyek normalisasi sungai di berbagai titik strategis. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi banjir dan pembersihan sedimen yang mulai menumpuk.

Kepala DPUBMSA Mohammad Mahmud mengungkapkan, fokus pengerjaan saat ini berada di sungai belakang Pabrik Gula (PG) Krembung. Tepatnya di wilayah Mojaruntut. "Kita melakukan normalisasi sungai di belakang PG Krembung karena sedimennya sudah sangat banyak. Kita perlu

melakukan intervensi normalisasi ini," ujar Mahmud, Selasa (10/2).

Menurut dia, pengerjaan di titik Mojaruntut ini ditargetkan mencakup aliran sungai sepanjang kurang lebih 3 km. Pihaknya optimistis pengerjaan di lokasi tersebut rampung dalam waktu dekat agar alat

berat dapat digeser ke titik lain yang membutuhkan penanganan serupa. "Target kami dua sampai tiga hari lagi sudah selesai di sini. Setelah itu, kami akan berpindah ke lokasi yang lain secara simultan," tambahnya.

Selain di Krembung, Mahmud menjelaskan bah-

wa pihaknya telah menjadwalkan normalisasi di empat lokasi berbeda. Di antaranya, normalisasi Sungai Kacernguli di Desa Kedungkembar. Kemudian Afvoer Wilayat di Sukodono, pembersihan sampah rutin di sungai, lantas di daerah Kedondong, Tulangan.

Hasil pengerukan sedi-

men dari normalisasi sungai tidak dibuang. DPUBMSA bersinergi Kodim 0816 dan koramil jajaran akan memanfaatkan sebagai bahan pengurukan dalam program Karya Bakti TNI Terpadu (KDMP). "Sehingga memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat," jelas Mahmud. (san/epe)



Polresta Sidoarjo Hadirkan Layanan Publik di CFD Alun-Alun Kota

Sidoarjo, Memorandum

Polresta Sidoarjo menghadirkan berbagai layanan publik saat *car free day* (CFD) di Alun-Alun Sidoarjo guna memberi rasa aman dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran personel kepolisian tersebut tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga melayani warga secara humanis yang memanfaatkan akhir pekan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo.

Pelayanan kepolisian yang disediakan meliputi SKCK Keliling Online, SIM Keliling, Samsat Keliling, serta pemeriksaan kesehatan gratis berupa cek gula darah, kolesterol, dan tekanan darah.



Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud kedekatan Polri dengan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Antusias masyarakat yang datang ke *car free day* cukup tinggi, karenanya kami hadir untuk memberikan rasa aman dan pelayanan Polri bagi masyarakat," ujar AKBP M Zainur Rofik, Minggu (8/2).

Ia menambahkan, kegiatan serupa akan rutin digelar agar masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kepolisian.

Selain itu, layanan publik



Personel Polresta Sidoarjo membuka layanan publik saat *car free day* di Alun-Alun Sidoarjo.

tersebut mendapat sambutan positif dari warga. M Syarif, warga Jasem, mengaku terbantu karena dapat mengurus SKCK sekaligus memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

"Tadi saya mau mengurus SKCK dan ternyata ada pelayanannya disini. Saya juga mengajak ibu untuk pemeriksaan kesehatan gratis, ini sangat membantu," ungkap M Syarif. (san/fer)

MEMORANDUM BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Terima Aduan Warga, Begini Sikap Bersahabat Suyarno SH

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Suyarno SH, wakil ketua DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, memiliki metode cukup sederhana namun mengena dalam setiap menerima keluhan dari warga yang datang ke gedung dewan.

Dengan selalu menebar senyum dan sikap yang sangat terbuka, menjadikan setiap persoalan yang disampaikan warga, menjadi diskusi ganyeng tanpa sekat.

Seperti saat menerima aduan puluhan warga Perumahan starflos Durung Bedug Candi pada Senin sore (9/2), terlihat sikap Suyarno sangat terbuka, mengajak diskusi warga di ruang kerjanya.

"Prinsipnya tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai, jika dilakukan diskusi terbuka dan transparan. Monggo utarakan persoalannya, nanti kita Carikan solusi terbaik," tutur Suyarno.

Tentu saja, penerimaan yang cukup bersahabat ini, disambut dengan diskusi



ganyeng dari warga pengaduan.

Menurut Sugeng salah satu warga pengaduan, banyak user para pembeli per-

mahan Starflos yang sampai saat ini belum menerima sertifikat perumahan meski membeli dengan cash.

Tidak hanya itu, pada



pembangunan perumahan tahap IV, juga banyak user yang sudah lunas tapi belum ada progress pembangunan. Karenanya, warga men-

datangi gedung dewan, untuk bisa mendapatkan jalan keluar dari persoalannya.

"Kita ingin dibantu untuk menuntaskan masalah ini," tutur Sugeng.

Suyarno yang dari awal menyimak keluhan warga ini dengan seksama, setelah melakukan diskusi sekitar 30 menit, akhirnya meminta kepada staff sekretariat, untuk menjadwalkan hearing bersama seluruh pihak terkait, untuk mencari solusi terbaik.

"Pekan depan kita jadwal hearing bersama. Saya akan laporkan ini ke ketua dewan untuk mendapatkan waktu yang tepat," tutur Suyarno.

Sebelum menerima warga perumahan Starflos ini, Suyarno juga berkesempatan mendatangi Posko gabungan LSM di alun alun Sidoarjo Sido barat, yang akan menggelar demo pada Selasa besok.

Disitu, Suyarno juga bercakap cukup lugas, sembari menerima masukan dari para LSM yang ada. (Nang)

Hasil Pengerukan Dimanfaatkan untuk Pembangunan Koperasi

■ Kebut Normalisasi Sungai

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak ingin kecolongan saat musim penghujan tiba. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA), perang terhadap sedimen dan sumbatan sungai terus digencarkan.

Alat-alat berat dikerahkan ke titik-titik strategis guna memastikan aliran air tetap lancar dan risiko banjir dapat ditekan seminimal mungkin. Fokus utama saat ini tertuju pada aliran sungai di belakang Pabrik Gula (PG) Krembung, tepatnya di Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Muhammad Makhmud



DIKERUK: Sejumlah alat berat diterjunkan untuk normalisasi sungai di Sidoarjo dengan tujuan mencegah banjir.

menegaskan, pengerjaan di titik ini bersifat krusial karena tumpukan sedimen yang sudah melebihi kapasitas sungai.

"Kita melakukan normalisasi sungai di belakang PG Krembung karena sedimen yang sudah sangat banyak. Oleh karena itu, perlu ada intervensi cepat," ujar Makhmud, Selasa (10/2).

Pengerjaan di Mojaruntut mencakup aliran sepanjang tiga kilometer. Makhmud menargetkan timnya bekerja dengan efisiensi tinggi agar alat berat dapat segera bergeser ke zona merah lainnya.

"Target kami dua sampai tiga hari lagi sudah selesai di sini. Setelah itu, kami akan berpindah ke lokasi yang lain secara simultan," tambahnya.

● Ke Halaman 10



Solusi Macet Jalan Raya Karangbong, Dorong Jalan Alternatif Dibeton

GEDANGAN-Keluhan masyarakat terkait sempit dan padatnya Jalan Raya Karangbong, Kecamatan Gedangan, akhirnya mendapat respons serius dari parlemen. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi guna mematangkan rencana pembukaan jalur alternatif baru di kawasan industri tersebut, Selasa (10/2).

Langkah ini diambil menyusul kondisi Jalan Raya Karangbong yang dinilai sudah tidak layak untuk menampung volume kendaraan, terutama saat berpapasan antar kendaraan besar.

Warih menegaskan, melebarkan jalan utama (Jalan Raya Karangbong) akan memakan biaya besar dan proses yang rumit karena harus melakukan pembebasan lahan milik warga. Sebagai solusi-

nya, ia menawarkan optimalisasi Jalan Industri yang terletak di sebelah selatan jalan raya.

"Artinya jalannya sudah ada tinggal memadatkan. Tidak perlu pembebasan lahan karena tinggal jalannya saja dibikin. Kalau kita menguatkan Jalan Raya Karangbong, satu pembebasan lahan itu sudah berapa besar biayanya," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, pengerjaan di jalur alternatif ini jauh lebih minim risiko ekonomi bagi perusahaan sekitar dibandingkan melakukan betonisasi di jalan utama.

"Apalagi kalau di sana (Jalan Raya Karangbong) dibeton, pekerjaannya lebih dari dua bulan, rugi sudah mereka (perusahaan). Maka satu-satunya yang bisa dilakukan ya jalan ini



SIDAK: Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono (kiri) saat melakukan pengecekan Jalan Industri di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Selasa (10/2).

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

<